

# J24022117020

*by* Fekon Uniga

---

**Submission date:** 23-Mar-2022 03:15AM (UTC+0000)

**Submission ID:** 1790642447

**File name:** ELOLA\_PADA\_DESA\_MEKARSARI\_KECAMATAN\_CILAWU\_KABUPATEN\_GARUT.docx (57.14K)

**Word count:** 2444

**Character count:** 16769

**ANALISIS TATA KELOLA PADA DESA MEKARSARI  
KECAMATAN CILAWU KABUPATEN GARUT**

**Neng Devi Widia<sup>1</sup>; Marti Dewi Ungkari<sup>2</sup>; Desy Qoriah<sup>3</sup>**

**Neng Devi Widia<sup>1</sup>**

**Email : [24022117020@fekon.uniga.ac.id](mailto:24022117020@fekon.uniga.ac.id)**

**089655051683, UNIVERSITAS GARUT**

**Marti Dewi Ungkari<sup>2</sup>**

**Email : [m.ungkari@uniga.ac.id](mailto:m.ungkari@uniga.ac.id)**

**085222275285, UNIVERSITAS GARUT**

**Desy Qoriah<sup>3</sup>**

**Email : [desiq@uniga.ac.id](mailto:desiq@uniga.ac.id)**

**08522509059, UNIVERSITAS GARUT**

**ABSTRAK**

Penelitian ini Berjudul “**Analisis Tata Kelola pada Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut**”, Alasan penelitian ini adalah untuk memutuskan administrasi yang dilakukan oleh Kota Mekarsari, Daerah Cilawu, Rezim Garut.

Teknik pemeriksaan yang digunakan adalah investigasi subjektif dengan berbagai informasi memanfaatkan eksplorasi perpustakaan, dan penelitian lapangan sebagai pertemuan dan dokumentasi. Sedangkan informasi prosedur dewan memanfaatkan informasi pemeriksaan.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa administrasi yang baik ditunjukkan oleh keterusterangan, tanggung jawab, struktur, daya tanggap, arah kesepakatan, kecukupan dan kecakapan, keseragaman, visi utama, dan tidak adanya dukungan daerah dalam pemerintahan.

Kata Kunci : Tata Kelola, *Good governance*

## **ABSTRACT**

*This research is entitled “Analysis of governance in Mekarsari village Cilawu”, The reason for this study was to decide the administration done by Mekarsari Town, Cilawu Area, Garut Regime.*

*The examination technique utilized was subjective investigation with information assortment utilizing library exploration, and field research as meetings and documentation. While the information the board procedure utilizing information examination.*

*The outcomes acquired show that great administration is shown by straightforwardness, responsibility, structure, responsiveness, agreement direction, adequacy and proficiency, uniformity, key vision, and absence of local area support in government.*

*Keywords : Governance, Good Governance*

## **1. PENDAHULUAN**

Cara paling umum untuk menjalankan kekuasaan negara dalam melaksanakan pengaturan kerja dan produk publik adalah penting untuk administrasi yang hebat. Terselenggaranya pemerintahan lingkungan yang layak sebagai suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik ditunjukkan oleh keterusterangan, tanggung jawab, kerjasama, ketanggapan, arah kesepakatan (kepentingan umum terletak), visi vital dan ketertiban (rule of law). Sebuah organisasi administrasi yang merupakan lambang komitmen untuk mewakili pencapaian atau kekecewaan dari pelaksanaan urusan kantor (Dwiyanto, 2008).

Menuju administrasi yang hebat, moral politik dan pemerintahan ditujukan untuk memahami pemerintahan yang sempurna, produktif, dan menarik, serta mendorong lingkungan politik berbasis suara yang digambarkan oleh penerimaan, perasaan berkewajiban, responsif terhadap tujuan individu, memperhatikan kontras, keaslian dalam persaingan, keinginan untuk mengakui berbagai anggapan. lebih

benar, dan menjaga kebebasan bersama dan keseimbangan antara hak istimewa dan komitmen dalam keberadaan negara dan negara.

Kota Mekarsari merupakan salah satu kota yang menggantungkan diri pada wilayah agraris meskipun tidak sedikit pula penduduknya yang menjadi pedagang dan pegawai pemerintah. Kawasan hortikultura di kota ini bisa dibilang sangat besar mengingat dalam setahun, peternak bisa menuai tiga kali panen dan jika dilihat dari pembangunannya yang berwibawa, kawasan pedesaan dikenang sebagai kawasan yang terkoordinasi sejak saat ini. memiliki tandan peternak yang dapat menghubungkan kerinduan peternak baik dalam pilihan sosial politik maupun dalam memutuskan. bagian fungsional untuk memperoleh kebutuhan agraria seperti kompos, benih, obat-obatan untuk hasil pertanian, dan lain-lain. Sebagian besar lahan di Kota Mekarsari dimanfaatkan di kawasan agraris. Jadi secara singkat cenderung beralasan bahwa sebagian besar penduduk di Kota Mekarsari bermata pencaharian hortikultura.

Bahkan mekarsari didalam partisipasi masyarakatnya masih belum dilakukan dengan baik pada prinsip *good governance*, ada beberapa warga yang tahu dalam program dan kegiatan yang ada di desa mekarsari Dengan itu peneliti tertarik untuk meneliti di desa mekarsari. Mengingat fondasi dan kekhasan yang digambarkan, para pencipta tertarik untuk mengarahkan eksplorasi dengan judul **“Analisis Tata Kelola pada Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut”**.

**TUJUAN PENELITIAN**, sesuai dengan latar belakang Pemeriksaan ini adalah: Untuk mengetahui administrasi yang diselesaikan oleh Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### 2.1 Konsep Administrasi

(Sedarmayanti, 2009) menyatakan “Administrasi pemerintahan atau dalam bahasa Inggris (*administration*), untuk lebih spesifik: demonstrasi, realitas, cara mengawasi. Berarti kegiatan, kenyataan, contoh dan pelaksanaan organisasi pemerintah. Dengan demikian, administrasi adalah pemanfaatan atau

pelaksanaan, khususnya pemanfaatan politik, posisi moneter dan regulasi untuk mengawasi masalah publik di semua tingkatan, baik di tingkat lokal maupun teritorial. Model administrasinya bisa mengerikan atau hebat. Model hebat ini kemudian disebut administrasi hebat. Menurut (Dwiyanto, 2008) *governance* merupakan konsep istilah *good governance* atau model yang tidak baik sebuah model tata kelola pemerintahan yang tidak baik (*bad governance*).

#### 2.1.1 Unsur-Unsur Tata Kelola Pemerintahan

- 1) Negara
- 2) Area pribadi (private area)
- 3) Masyarakat umum (common society)

#### 2.1.2 Administrasi Lingkungan Besar

Menurut (Sedarmayanti, 2009) menyatakan "Selain tidak menjadi sindikasi administrasi, gagasan administrasi yang baik tentu tidak hanya harus diterapkan di tingkat publik, tetapi secara signifikan lebih kritis di tingkat terdekata, teritorial dan kota." Pada umumnya, pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah akan membawa perubahan yang sangat mendasar dalam susunan tenaga ahli pemerintahan di bagian-bagian dasar Badan Legislatif Focal dan Daerah (baik Umum dan Pemerintahan atau Kabupaten Kota dan Kota). Dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, daerah mandiri semakin lengkap, khususnya bagi daerah atau masyarakat perkotaan dan kota, lebih spesifiknya: kewenangan kemerdekaan yang luas, sejati, dan cakap.

#### 2.1.3 Standar Administrasi Yang Baik

(Dwiyanto, 2008) standar yang dibuat dalam administrasi hebat adalah sebagai berikut:

##### a. Transparansi (*Transparency*)

Standar keterusterangan membuat kepercayaan bersama antara otoritas publik dan masyarakat umum melalui penataan data dan menjamin kemudahan memperoleh data yang tepat dan memuaskan.

##### b. Tanggung jawab

Sebuah. Tanggung Jawab Vertikal, tanggung jawab untuk menyimpan papan ke posisi yang lebih signifikan. Tanggung jawab tingkat, tanggung jawab ke wilayah lokal lebih luas.

##### c. Minat

Setiap penduduk memiliki suara dalam navigasi, baik secara langsung atau melalui perusahaan agen asli yang menangani kecenderungan mereka. Dukungan yang luas tersebut didasarkan pada kesempatan berkumpul dan artikulasi, serta kemampuan untuk mengambil bagian secara terorganisir.

d. Sistem atau hukum dan ketertiban (law and order)

Pedoman ini melambangkan hukum dan ketertiban yang masuk akal untuk semua pertemuan terlepas, mempertahankan kebebasan umum dan berfokus pada kualitas yang hidup di arena publik.

e. (Ketanggapan)

Yayasan dan semua siklus administrasi harus berusaha melayani setiap individu yang terlibat secara dekat. Organisasi spesialis publik harus menerima persyaratan daerah yang dapat ditunjukkan sebagai strategi, kesiapan program, dan pelaksanaan menggunakan sistem dengan mempertimbangkan standar administrasi yang baik.

f. Arah Perjanjian (Diatur untuk kepentingan umum)

Administrasi besar mencakup kepentingan yang berbeda untuk mengumpulkan kesepakatan umum tentang apa yang terbaik untuk pertemuan lokal dan jika mungkin kesepakatan tentang pendekatan dan strategi. Teknik dinamis kesepakatan, selain memiliki opsi untuk memenuhi semua pertemuan atau sebagian besar pertemuan, strategi ini akan mengikat sebagian besar bagian yang konsultasi dan memiliki kontrol paksaan atas yang terlibat sepenuhnya untuk melaksanakan pilihan.

g. Kecukupan dan Produktivitas

Otoritas publik harus layak dan efektif dalam menciptakan hasil sebagai aturan, pengaturan, dan eksekutif akun negara. Standar kecukupan biasanya merupakan perkiraan batas hasil yang dapat sampai pada tingkat kepentingan publik dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sementara itu, efektivitas pada umumnya diperkirakan oleh pertimbangan biaya perbaikan untuk mengatasi masalah, semua hal dipertimbangkan. Semakin sederhana pengeluaran yang dilakukan untuk keuntungan yang sebaik-baiknya, maka otoritas publik termasuk dalam klasifikasi pemerintahan produktif.

h. Ekuitas

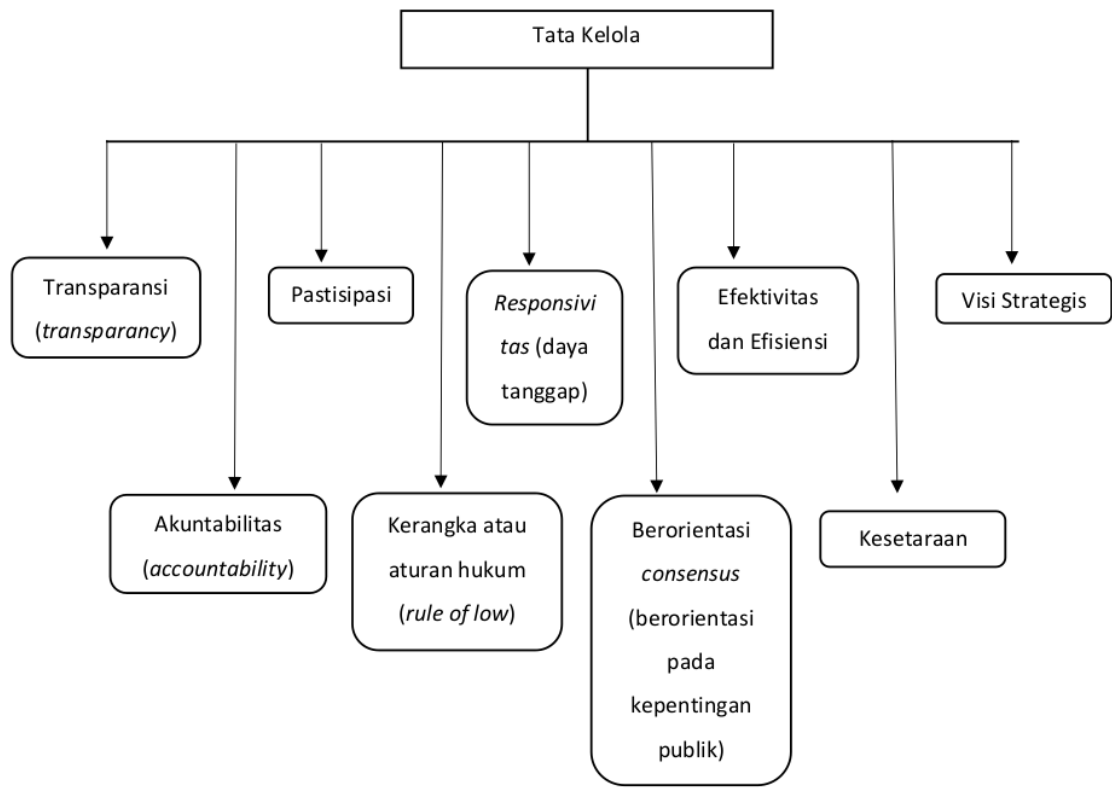
Aturan keseragaman membuat kepercayaan bersama antara otoritas publik dan masyarakat umum melalui pengaturan data dan menjamin kesederhanaan memperoleh data yang tepat dan memuaskan.

i. Penglihatan Vital

Vital Dreams adalah perspektif vital untuk menghadapi apa yang akan datang. Karena itu, strategi apa pun yang akan diambil hari ini, harus dilihat sebagai hasil dalam sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Tidak hanya sekedar memiliki rencana penting untuk masa depan, seorang individu yang melibatkan pejabat publik atau yayasan ahli lainnya harus mampu memecahkan masalah dan kesulitan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pelaksanaan masing-masing secara khusus diperlukan sebagai syarat untuk terciptanya administrasi yang baik dan pemerintahan yang bersih.

2.1.4 Kerangka Pemikiran

Demi mewujudkan pemerintahan yang Hebatnya, otoritas publik berusaha memahami pemerintahan yang bersih dan definitif atau cenderung disebut administrasi. Otoritas publik sebagai penghibur utama dalam melaksanakan pemerintahan ini diharapkan dapat memberikan tanggung jawab yang lebih lugas dan lebih tepat. Khususnya dalam pemerintahan kota, karena semakin penting untuk dilakukan dalam masa perubahan ini dengan memampukan pekerjaan instansi-instansi sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah. Kebetulan administrasi ini bisa disebut administrasi besar, salah satu pilihan penting untuk melaksanakan administrasi besar adalah melalui pelaksanaan administrasi publik. Bekerja pada sifat organisasi yang didukung pembayar pajak terdekat untuk populasi umum sangat penting bagi negara bagian untuk mencapai pemenuhan pekerjaan secara lokal.



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**



4

### 3. METODE PENELITIAN

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik subjektif, artinya suatu metodologi yang lebih menekankan pemeriksaan terhadap proses pemilihan yang rasional dan induktif serta pada penyelidikan terhadap keanehan-keanehan yang diperhatikan atau sekedar menganalisis masalah dengan tidak menunjukkan atau mengabaikan teori. (Sugiyono, 2017).

### 4. HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Analisis Tata Kelola Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

Hasil wawancara di atas tata kelola disimpulkan bahwa di dalam partisipasinya kurang baik karena masyarakatnya kurang berpartisipasi terhadap pemerintah. Ini sesuai hipotesis (Dwiyanto, 2008) ialah Hebatnya administrasi dilihat dari kegiatan, realitas, contoh dan pelaksanaan organisasi pemerintahan. Pemeriksaan ini merupakan eksplorasi yang berkaitan dengan pemeriksaan yang akan diselesaikan oleh pencipta. Eksplorasi ini merupakan kajian yang keduanya membahas tentang administrasi besar yang dilakukan oleh kota dalam menerapkan standar administrasi yang baik.

#### 4.1 Pemanfaatan Standar Tata Tertib yang Baik di Pemerintahan Kota Mekarsari, Kecamatan Cilawu, Rezim Garut

##### 1. Keterusterangan (*Transparency*)

Hasil wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa di Desa Mekarsari sebenarnya sangat baik dalam konsep *governance* dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara Transparansi. Dimana setiap program, kegiatan, perencanaan dan pelaksanaan di Desa Mekarsari terus menggabungkan pionir area lokal dan beberapa jaringan lain dengan cara bermusyawarah supaya masyarakat mengetahui apa yang terjadi di Desa Mekarsari seperti seberapa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang masuk dan dikeluarkan, Program yang harus dilaksanakan, Kegiatan yang akan dilakukan dan lain-lain.

##### 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Hasil wawancara diatas menunjukkan baik dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mempertanggungjawabkan dengan baik

kepada atasan dan masyarakatnya, Bagaimanapun, tidak dapat dikatakan bahwa tugas otoritas publik itu benar dengan alasan bahwa otoritas publik harus membantu daerah setempat sejauh memberikan persiapan, dan berbagai jenis pengaturan, misalnya, mengawasi aset normal dengan berbagai macam cara misalnya hasil kebun dan lain sebagainya. Walaupun sudah cukup baik untuk pelatihan dan pengembangan ekonomi masyarakat sumber daya manusianya harus ditingkatkan lagi dalam pelaksanaannya.

### 3. Partisipasi

Hasil wawancara diatas ternyata Desa Mekarsari kurang partisipasi, Sehingga kontrol masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan pemerintahan desa. Partisipasi dalam hal ini, dapat melibatkan kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan juga mempersempit ruang gerak Pemerintahan Desa (Kepala Desa) Mekarsari dalam melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Setiap gerakan yang dilakukan oleh otoritas publik hanya untuk menarik perhatian daerah setempat, tetapi juga berubah menjadi lapangan di mana daerah itu ada dan tersedia untuk kepentingan kemajuan Kota Mekarsari.

### 4. Kerangka atau Aturan Hukum (*rule of law*)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa di Desa Mekarsari baik dalam menerapkan Kerangka atau Aturan Hukum, Ternyata di Desa Mekarsari jika ada masyarakat yang melanggar aturan hukum maka akan dimusyawarahkan untuk mengakui kesalahan yang dibuat jika terbukti, maka akan diberi hukuman yang setara dengan kesalahan yang dibuat. Dengan adanya kerangka atau aturan hukum untuk menciptakan hak asasi manusia.

### 5. *Responsivitas* (Daya Tanggap)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa responsivitas baik dalam menghadapi permasalahan masyarakat. Sangat berperan dan penting pemerintah Desa harus melayani dan menanggapi dengan baik bukan hanya, walaupun responsivitas baik Kepala Desa dan pegawai desa lainnya dan harus di tingkatkan lagi penerapan responsivitas tidak boleh menurun.

Bahkan harus menepati janjinya dan banyak permasalahan-permasalahan yang sudah ditandatangani oleh kepala Desa. Dengan permasalahan yang ada ini akhirnya menimbulkan adanya kepercayaan bahwa masyarakat terhadap pemerintahan desa yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

6. Orientasi konsensus (Berorientasi Pada Kepentingan Publik)

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa dalam kepala Desa Mekarsari dalam peranannya sudah terkait dengan Orientasi konsensus dilaksanakan dengan sangat baik. Maka dari itu kepala desa benar-benar menerapkan prinsip Orientasi konsensus kepada pegawai Desa dan warga masyarakatnya dengan baik, Pemerintahan Desa Mekarsari harus ditingkatkan, dipertahankan dalam penerapan Arah kesepakatan. Dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi secara lokal, Pemerintah Kota Mekarsari umumnya menitikberatkan pada musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan jiwa keterkaitan.

7. Efektivitas dan Efisiensi

Konsekuensi dari pertemuan tersebut dapat dianggap bahwa pekerjaan kepala kota Mekarsari sudah menerapkan dengan baik pada efektivitas dan efisiensi kepada masyarakat. Karena prinsip ini dalam pemerintahan Desa untuk menuju *good governance* sangat penting, bahkan sangat berperan dalam dukungan dari masyarakat jika masyarakat mendukung maka pemerintahan untuk menjalankan programnya akan berjalan dengan efektivitas dan efisiensi.

8. Kesetaraan

Hasil wawancara tersebut kepala Desa Mekarsari kesetaraan dengan baik bahkan tidak hanya masyarakatnya namun ke pihak pegawai desa pun diterapkan dengan prinsip *good governance*. Prinsip kesetaraan ini sangatlah penting dalam pemerintahan desa supaya pemerintahan Desa dalam tata kelolanya berjalan dengan baik dan lancar. Dengan adanya Kesetaraannya ialah baik kepada masyarakat supaya masyarakat memiliki nyaman dan aman, baik dalam kebutuhan atau keinginan dan pelayanannya.

## 9. Visi Strategis

Konsekuensi dari pertemuan tersebut dapat diduga bahwa Kepala Kota dalam visi strategisnya sudah dilaksanakan dengan baik, karena untuk memiliki pemerintahan yang baik harus memiliki visi Strategisnya supaya pemerintahan bisa berjalan dengan lancar dan baik dan didukung oleh transparansi, akuntabilitas, kerangka atau aturan hukum (*rule of law*), *responsivitas* (daya tanggap), kesetaraan, efektivitas dan efisien, *orientasi konsensus* (berorientasi pada kepentingan publik).

## 5. Akhir

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Kota Mekarsari, Wilayah Cilawu, Rezim Garut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Tata kelola Kota Mekarsari, Wilayah Cilawu, Rezim Garut cukup baik, hal ini dapat ditunjukkan :

- a. Transparansi adanya keterbukaan pada masyarakat.
- b. Akuntabilitas adanya pertanggungjawaban pemerintahan desa ke masyarakat dan kecamatan.
- c. Partisipasi kurangnya partisipasi masyarakat kepada pemerintahan desa dalam kegiatan dan program.
- d. Kerangka atau hukum dan ketertiban menerapkan peraturan dan pedoman yang sesuai.
- e. Responsivitas (daya tanggap) berperan penting dalam melayani dan menanggapi dengan baik dalam permasalahan masyarakat.
- f. Orientasi konsensus (berorientasi pada kepentingan publik) dilaksanakan dengan baik dalam menjembatani kepentingan yang berbeda.
- g. Efektivitas dan efisiensi adanya dukungan dari masyarakat dalam program dan kegiatan.
- h. Kesetaraan dilakukan dengan baik bahkan diterapkan kepada masyarakat dan pegawai desa agar memiliki kenyamanan dan aman.
- i. Visi strategis adanya perubahan dari tahun ke tahun supaya menciptakan pemerintahan.

## 5.2 Ide

Mengingat efek samping dari pemeriksaan yang telah dilakukan, para ahli ingin mengemukakan Saran dalam Tata Kelola yaitu di dalam Partisipasi masyarakat diharapkan agar Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut memiliki pilihan untuk menarik pertimbangan daerah setempat untuk mengambil bagian baik secara etis maupun nyata, Maka diharapkan Kepala Desa perlu meningkatkan kompetensi Aparat Desa. Selain itu kepala Desa perlu membuat pola partisipasi masyarakat agar lebih efektif misalnya berdiskusi tentang pembangunan jalan, menawarkan sudut pandang yang berhubungan dengan kemajuan kantor, membuat kegiatan kerjasama dalam memperbaiki jalan, gotong royong dalam membersihkan jalan, turut andil dalam mengawasi proses pembangunan agar berjalan sebagaimana mestinya dan merawat kapasitas umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, S.I. (1993). Ilmu Sosial Metropolitan dan Provinsi. Surabaya : Upaya Publik.
- Bratakusuma, D.S. (2002). Kemandirian Organisasi Pemerintah Daerah . Jakarta:  
Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, A. (2008). Mengakui administrasi yang hebat melalui administrasi terbuka.  
Yogyakarta: Pers Perguruan Tinggi Gajah Mada.
- Sedarmayanti. (2009). Perubahan implementasi kebijakan, Perubahan Peraturan, dan  
Inisiatif Masa Depan. Mengakui Bantuan Luar Biasa dan Administrasi Hebat,  
328-329.
- Sugiyono. (2017). Strategi Eksplorasi Kuantitatif Fan R dan D. Bandung : Alfabeta.
- Lajang. (2012). Investigasi Administrasi yang Baik dan Ukuran Teman yang  
Mempengaruhi Eksekusi Organisasi. Investigasi Observasi BUMN Non Moneter  
di BEI 2015-2018, 39.

J24022117020

---

ORIGINALITY REPORT

---

4%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

1

sosio publika.wordpress.com

Internet Source

2%

---

2

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

---

3

es.scribd.com

Internet Source

1%

---

4

text-id.123dok.com

Internet Source

<1%

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off